

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2024



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
NOMOR:KEP/15/VII/2023 TANGGAL 31 JULI 2023

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Nomor: Kep/15/VII/2023

tentang

RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri T.A. 2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

Negara

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/979/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/22/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan atas Sebagian isi Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/11/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Keuangan Polri Tahun 2020-2024;
3. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor: B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023
Nomor: S-287/MK.02/2023
tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A. 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI TENTANG RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2024.

1. Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran jajaran Keuangan Polri;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2023

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



	HAL
I. LATAR BELAKANG	
1. Kondisi Umum.....	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis	5
2. Identifikasi masalah.....	7
II. TUJUAN DAN SASARAN	
1. Visi dan Misi Polri.....	8
2. Visi dan Misi Puskeu Polri.....	8
3. Tujuan.....	9
4. Sasaran Prioritas	10
III. ARAH KEBIJAKAN	
1. Arah Kebijakan Polri.....	11
2. Arah Kebijakan Puskeu Polri.....	43
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF T.A. 2024	
1. Program dan Kegiatan Puskeu Polri.....	45
a. Program Profesionalisme SDM Polri.....	45
b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana.....	45
c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat..	46
d. Program Dukungan Manajemen	46
2. Pagu Indikatif Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024	47
3. Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Puskeu Polri T.A. 2024	50
V. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	
FORM APLIKASI RENJA PUSKEU POLRI T.A. 2024	

RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI T.A. 2024

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum.

Tahun 2024 merupakan tahun Kelima dari Tahapan Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri T.A. 2023 untuk itu perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2024. Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2024 ini merupakan penjabaran dari Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2024 dan Rencana Strategis Puskeu Polri Tahun 2020-2024. Reformasi Manajemen Keuangan Polri diawali pada tahun 2004 yang ditandai dengan dikeluarkannya 3 (tiga) paket Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan Keuangan Negara yang mengacu pada Internasional *best practice* yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan Tugas Pokok Fungsi bidang keuangan yang Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel, dan Terpercaya (TEPAT), Puskeu Polri telah menetapkan tujuan dalam sebagai berikut:

1) menguatkan

- 1) menguatkan peran Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan Polri;
- 2) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- 3) menerapkan manajemen Puskeu Polri yang terintegrasi, bersih, terbuka dan melayani.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran yang untuk pencapaiannya ditetapkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan meliputi:

Program Profesionalisme SDM Polri, bertujuan Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya secara profesional dan proporsional.

Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana, bertujuan Memelihara Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bertujuan Memelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

Program Dukungan Manajemen, bertujuan terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta kerja sama lintas sektor.

Kondisi umum seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu perkembangan aspek kehidupan bermasyarakat dan pengaruh lingkungan terhadap pelaksanaan tugas, baik di Lingkungan eksternal maupun internal. Dalam upaya menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Puskeu Polri mempunyai potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan Polri, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

Reformasi praktik pengelolaan keuangan publik di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena tiga hal pertama, kegagalan negara dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak berlandaskan prinsip *good governance* dan *clean government*. Prinsip *good governance* menekankan akuntabilitas, demokrasi, tanggung jawab dan aturan hukum. Sedangkan prinsip *clean government* menekankan proses, struktur, *cognition* dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, tekanan internasional dan etika, akuntabilitas dan transparansi. Kedua, munculnya tuntutan masyarakat agar negara menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini mendorong setiap organisasi pemerintahan untuk memiliki kualitas kinerja birokrasi yang tinggi termasuk aspek pertanggung jawaban baik secara operasional maupun penggunaan anggaran pada setiap program kerja. Ketiga, lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kelima undang-undang tersebut mengatur secara mendasar dan komprehensif tentang pengelolaan keuangan publik. Beberapa peraturan tersebut menekankan peran siapa saja yang memiliki wewenang terkait pengelolaan keuangan negara, susunan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Aturan tersebut juga menjadi landasan hukum dibidang pengelolaan dan administrasi keuangan negara baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Aturan tersebut telah mengubah bagaimana

Pemerintah

Pemerintah mengelola keuangan sektor publik. Selama ini, pemerintah pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pendekatan superioritas yang menjadikan mereka tidak berada dalam profesi manajemen oleh para profesional, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah perlu diarahkan dengan menekankan prinsip *good governance* yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan pengelolaan keuangan publik di Indonesia yang menekankan prinsip *good governance* sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Praktik-praktik terbaik yang harus diperhatikan bagi organisasi publik dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan menekankan aspek *komprehensif* dan disiplin, legalitas dan legitimasi, fleksibilitas, dapat diprediksi, dapat diuji, informatif, dan transparan dan akuntabel. Beberapa poin di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dituntut untuk memiliki suatu keseragaman dalam hal pelaporan keuangan kepada pemerintah. Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pengelolaan, akuntansi dan administrasi keuangan organisasi publik antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, PMK RI Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK RI Nomor: 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. Beberapa aturan tersebut menyatakan bahwa organisasi publik memiliki sistem akuntansi dan keuangan tersendiri yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara akan berfokus pada sistem akuntansi keuangan dan administrasi keuangan sehingga terdapat beberapa standar tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi publik dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah. Sistem akuntansi keuangan menjadi bagian penting

dalam

dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pada organisasi publik yang dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah setiap organisasi publik akan memiliki format dan cara yang sama dalam membuat laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi berperan penting dalam proses pelaporan keuangan bagi setiap organisasi publik. Fungsi pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi yang berkaitan realisasi pelaksanaan anggaran sampai akhir periode. Laporan keuangan tersebut disusun dan disampaikan oleh setiap organisasi publik kepada pimpinannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut berisikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri bukti-bukti yang mengesahkan penggunaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, fungsi pelaporan memainkan peran penting sebagai mekanisme pertanggung jawaban pengguna anggaran terhadap pemberi anggaran yaitu negara. Selain itu, fungsi pelaporan keuangan jugaberperanaktif dalam menetapkan sistem akuntansi dan mekanisme pelaporan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesamaan dan keselarasan setiap organisasi publik dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya pada akhir tahun anggaran. Fungsi administrasi keuangan juga memainkan peran penting sebagai penunjang dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pada proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Fungsi administrasi dijalankan dengan asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan dan asas spesialisasi, dimana keempat asas tersebut menuntut agar semua dokumen anggaran pendapatan dan belanja, transaksi keuangan disajikan secara utuh dan terperinci peruntukannya dalam satu kesatuan pada periode atau tahun tertentu.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari "*faktor internal dan eksternal*" sehingga perlu untuk dilakukan

identifikasi

identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Puskeu Polri sebagai salah satu organisasi publik dan menjadi satuan kerja Polri yang mengemban fungsi pengelolaan dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polri. Hal ini menuntut Puskeu Polri untuk memberikan pelayanan keuangan yang prima kepada pemangku kepentingan di lingkungan Polri, sehingga program kerja yang ada di lingkungan Polri dapat dijalankan dengan baik secara optimal. Berlandaskan pada tujuan Puskeu Polri untuk menjadi organisasi yang mampu melakukan pengelolaan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani dibutuhkan sumberdaya dan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya tersebut dapat diwujudkan dengan adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga Puskeu dapat melakukan kegiatan pengembangan dan program kerja yang memberikan dampak positif dan jangka panjang bagi semua personel keuangan di lingkungan Polri. Sedangkan, sarana dan prasarana tersebut harus berfokus pada teknologi informasi agar setiap pengelolaan Keuangan Negara dapat diawasi oleh pemangku kepentingan sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal ini juga dapat menjamin independensi dan saling uji (*check and balance*) dan menghindari terjadinya pemborosan serta penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Negara.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, organisasi publik dapat dikatakan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Hal ini menandakan bahwa organisasi publik merupakan Lembaga yang dituntut

untuk

untuk memberikan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas sesuai dengan tujuan dan tugas pokok masing-masing Lembaga.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada analisis di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Tugas dan fungsi Puskeu masih terfokus pada fungsi administrasi saja belum berfokus pada fungsi pembinaan sehingga langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Puskeu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan Polri menjadi belum optimal;
- b. Unsur pelaksana teknis Puskeu (Bidbia, Biddal, Bidverif, Bid APK) telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tapi setiap bidang juga melaksanakan pekerjaan di luar aturan tersebut yang berdampak pada organisasi secara keseluruhan meskipun pekerjaan tersebut berada pada Satker lain;
- c. Ketidaksetaraan diantara satuan kerja antara Puskeu Polri dengan Srena Polri dan Slog Polri dalam pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan pengawasan yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, sehingga perencanaan anggaran dilaksanakan oleh Srena Polri (Eselon I), pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Satker Polri (Eselon III sampai Eselon I), pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Puskeu Polri (Eselon II), dan pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Itwasum Polri (Eselon I). Dengan begitu, pelaporan keuangan di lingkungan Polri menjadi tidak optimal;
- d. Ketidaksetaraan Puskeu Polri dengan Slog Polri pada pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara, dimana Puskeu Polri (Eselon II) mengelola sistem dua pelaporan kepada Pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan

Sistem

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan Slog Polri hanya mengelola SIMAK-BMN;

- e. Ketidakjelasan rantai komando Puskeu Polri dimana dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Mabes Polri, Puskeu Polri merupakan Satker eselon II yang secara struktur berada di bawah Kapolri langsung, Tapi dalam pelaksanaan tugas rantai komando Puskeu Polri selalu melalui Srena Polri (Eselon I) yang menyebabkan Puskeu Polri kesulitan untuk melaksanakan tugas untuk koordinasi ataupun memberikan informasi kepada *stakeholder* internal Polri;
- f. Belum terpenuhinya profesionalisme personel keuangan, sehingga Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan akan terus menerus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan personel di Bidang Keuangan Polri guna mewujudkan reformasi birokrasi dan professional dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan Polri;
- g. Terdapat beberapa kegiatan pada sistem informasi keuangan di Lingkungan Polri di pusat sampai jajaran kewilayahan terjauh yang belum terintegrasi secara *realtime* atau *online* dengan berbasis teknologi informasi;
- h. Terdapat PNBPN yang tidak disetor tepat waktu, PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBPN kurang/belum dipungut dan PNBPN belum didukung dengan dasar hukum PNBPN yang memadai.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi Polri:

a. Visi Polri:

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib.

b. Misi Polri:

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

2. Visi dan Misi Puskeu Polri

a. Visi Puskeu Polri:

Menjadi Pembina Fungsi Keuangan yang *Modern* dan Unggul.

b. Misi

b. Misi Puskeu Polri

- 1) Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
- 2) Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- 3) Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

3. Tujuan

Adapun tema pembangunan Polri adalah “Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” meliputi:

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. modernisasi pelayanan Polri;
- d. mewujudkan Polri yang profesional;
- e. menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan yang ditetapkan Polri, Puskeu Polri sebagai bagian dari Satker di Lingkungan Polri perlu untuk menjabarkan tujuan tersebut ke dalam dokumen Renstra Puskeu Polri. Sebagai bentuk upaya dalam menjabarkan tujuan Polri, Puskeu Polri menjabarkan tujuan Puskeu Polri berdasarkan data primer hasil dari analisis lingkungan satuan kerja. Maka, dapat dijelaskan tujuan dari Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Puskeu:

- 1) Memperkuat peran Puskeu sebagai pembina fungsi keuangan Polri;
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- 3) Menerapkan manajemen Puskeu yang terintegrasi, bersih, terbuka dan melayani.

4. Sasaran

4. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polri tahun 2024 yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan”;
- 2) **kedua** “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang inovatif”;
- 3) **ketiga** “Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”;
- 4) **keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”;
- 5) **kelima** “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almitsus Polri yang Modern”;
- 6) **keenam** “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis IT”.

b. Sasaran Prioritas Puskeu Polri

Pada Rencana Kerja Polri Tahun 2024 Puskeu Polri berada pada:

- 1) Sasaran Prioritas IV “**Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri**” arah bijak: meningkatkan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police* 4.0, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meningkatkan kualitas dan kapabilitas **Verifikator** dan APIP di lingkungan **Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan** serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
- 2) sasaran prioritas VI yaitu “**Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis IT**”.

arah bijak: meningkatkan tatakelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan tingkat Satker;
- b) melaksanakan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan.

Guna memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka sasaran prioritas Puskeu Polri yaitu:

- 1) Mewujudkan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Polri;
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan verifikasi dokumen keuangan;
- 3) Mewujudkan mutu penyelenggaraan administrasi dan evaluasi pembiayaan;
- 4) Meningkatkan kualitas SDM Puskeu Polri.

III. Arah kebijakan

1. Arah kebijakan Polri.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Sasaran Prioritas I “Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan”
 - 1) arah bijak: meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung keamanan dalam negeri melalui kegiatan peningkatan kemampuan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri dengan didukung oleh personel, anggaran dan teknologi intelijen terkini yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat2,indikator1);
 - b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;
(giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKUa/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1);
 - c) meningkatkan penguatan pada program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;
(giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat3,indikator1);
 - d) melanjutkan penelitian dan survei dalam rangka mendukung/berkontribusi dalam Indeks Kamtibmas Polri;
(giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKPe/progQuickWins,prog7,giat1,indikator1);
- 2) arah bijak: menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat;
(giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat2,indikator1,2,3,4);
 - b) melakukan pencegahan berupa kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda

kelompok

kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme dan terorisme;

(giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4,giat2,indikator4);

- c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;

(giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/ progQuickWins,prog4,giat2,indikator1,2,3);

- d) melaksanakan kolaborasi dan sosialisasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme dan keluarganya;

(giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog6,giat1,indikator3);

- e) menetralsir informasi negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik/*public opinion* guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;

(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKPc/progQuickWins,prog2,giat3, indikator1);

- f) melaksanakan “*edukasi*” dan himbauan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;

(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKPg/progQuickWins,prog2, giat5, indikator1,2);

- g) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan Kriminalitas, pelacakan dan penangkalan serta tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;

(giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog Quick Wins,prog5,giat5,indikator1c);

- 3) arah bijak: meningkatkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka Harkamtibmas untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang terhadap kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat2,indikator1,2,3)
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat1,indikator1,2,3,4);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program "*Polisi RW*" dan asistensi penguatan KBPPP;
(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat3,indikator1);
 - d) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog6,giat2, indikator1,2);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat4,indikator1);
 - b) mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan ketegangan

atau potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas positif.

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat2,Indikator4);

- c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik;

(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat3,Indikator1,prog5,giat3,Indikator2);

- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcar dalam berlalu lintas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuick Wins,prog5,giat2,Indikator ,2);

- b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;

(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuick Wins,prog5,giat2,Indikator1,2);

- c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung “Pertumbuhan Ekonomi” serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;

(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5,giat2,Indikator3);

- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “Slum Area”;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) personel

- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas berintensitas tinggi, bencana serta wabah;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat3,Indikator1);
 - b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog4,giat3,Indikator1);
 - c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh “Bhabinkamtibmas” guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog4,giat4,Indikator1);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan dan “trauma healling” pada daerah rawan gempa dan bencana;
(giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM//SP1/SS3/ IKPa/SS5/IKPe/progQuickWins,prog4,giat2,indikator4);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2024; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat event nasional/internasional berlangsung;

- (giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5);
- b) melaksanakan pengamanan *event* nasional PON XXI tahun 2024 di Aceh dan Sumut;
(giat5079,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5);
- c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* internasional meliputi MotoGP, WSBK, *Motocross*, Sail Sangkuliran, *Tour* D'Singkarak, Toud D'Banyuwangi, Borobudur Marathon, Belitung Geopark Run dan World Surf League;
(giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5);
- d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru (IKN) di Kalimantan Timur;
(giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5);
- 8) arah bijak: meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dalam rangka *back up* kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial; dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait dari gangguan keamanan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka *back up* pengamanan Ibu Kota Negara baru;
(giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog Quick Wins,prog5);
- b) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;
(giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5,giat3,indikator2);
- c) melaksanakan

- c) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat;
(*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5,giat3,indikator2*);
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu; (*giat3131/prog Harkamtibmas/SP1/ SS1/ IKUa/ progQuickWins, prog5,giat2,indikator3*);
 - e) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kriminalitas dan bahaya Narkoba;
(*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog4*);
- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan kerja sama antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kerja sama antarlembaga, serta sinergi dengan “*stakeholder*” terkait;
(*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5*);
 - b) peningkatan kerja sama dengan KL terkait guna mendukung Kerjasama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama Bilateral dan Multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra Polri/Indonesia di mata internasional;
(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5*);
 - c) meningkatkan Kerja sama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah perbatasan;
(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5*);

- 10) arah bijak: meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung kegiatan keamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuick Wins,prog5,6);
 - b) melaksanakan “back up” patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan;
(giat3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5,6);
- 11) arah bijak: melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada tahun 2024;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada meliputi: Patroli, Penjagaan, Pengawalan peserta Pemilu/Pemilukada tahun 2024;
(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5,giat1,indikator1,2);
 - b) penyelenggaraan pengamanan objek vital (kantor KPU);
(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins, prog5,giat1,indikator1,2);
 - c) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada tahun 2024 guna menjamin netralitas Polri serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog5,giat1,indikator1,2);
 - d) melaksanakan

- d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu/Pemilukada tahun 2024;
(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins, prog5,giat1,indikator1,2);
 - e) melaksanakan penindakan dan penegakan hukum dalam sidik-lidik tindak pidana Pemilu/Pemilukada tahun 2024;
(giat3142/progLidikSidik/SP1/SS1/IKUa/progQuickWins,prog6, giat1,indikator1,2);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri di bidang pengamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun kemampuan kolaborasi operasional Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/prog QuickWins,prog5,6);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan diwilayah rawan kriminalitas serta obvit/ obvitnas dalam rangka penguatan Polri diperbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,3135,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa/ progQuickWins,prog5,6);
- b. Sasaran Prioritas II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Inovatif”
- 1) arah bijak: mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) peningkatan

- a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan Pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa/ProgQuickWins, prog7,giat1,indikator4*);
 - b) mengoptimalkan kegiatan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor;
(*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1/ ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator4*);
 - c) melanjutkan inovasi layanan publik yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal dilokasi *afirmatif* (menguatkan) dikawasan perbatasan;
(*giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS4/IKP4b/ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator4*);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri meningkatkan kualitas pelayanan dengan memiliki parameter ukuran untuk perbaikan, menjaga *zero tolerance* terhadap penyimpangan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan inovasi digitalisasi pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*;
(*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa/ProgQuickWins,prog7, giat1,indikator4*);
 - b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(*giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP5e/ProgQuickWins,prog2, giat1,indikator1*);

c) mengoptimalkan

- c) mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS)* V2 dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d/ProgQuickWins, prog2,giat1,indikator1);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan “*quick response*” kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang masih berbelit-belit;
(giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP5g/ProgQuickWins,prog7,giat2,indikator1);
 - b) mengoptimalkan “*respon time*” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/ProgQuickWins, prog2,giat1,indikator1);
 - c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;
(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/ProgQuick Wins,prog7,giat1,indikator1);
- c. Sasaran Prioritas III “Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”
 - 1) arah bijak: meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan

- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antarpenyidik di wilayah perairan Indonesia;
(giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6)
- b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1);
- c) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk TPPO, kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
(giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2);
- d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2);
- e) penanganan tindak pidana diperairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut;
(giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6);
- f) penanganan tindak pidana lalu lintas dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta Penegakkan Hukum melalui “*ETLE*” dan Tilang Manual;
(giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat2,indikator1,2);

g) melaksanakan

- g) melaksanakan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- h) penanganan kejahatan digital pada ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat.
(*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- i) penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- j) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
(*giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(*giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- l) melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu yang dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam Sentra Gakkumdu;
(*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2*);
- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan

- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik Labfor dan Inafis dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins,prog6);
 - b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran dari *Wassidik* guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins,prog6);
 - c) mengoptimalkan *e-MP* (e-Manajemen Penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins,prog6);
- 4) arah bijak: meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengintegrasikan

- a) mengintegrasikan *database* pelayanan dan penyajian informasi kriminal dari seluruh Satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;
(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins,prog6*);
 - b) standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);
(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa/ProgQuickWins,prog6*);
- d. Sasaran Prioritas IV “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”
- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 4.0*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan penguatan mutu lulusan Diklat Polri sesuai kebutuhan dan tantangan tugas;
(*giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
 - b) sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
 - c) meningkatkan latihan dan Harkatpuan fungsi Dalmas dan *Negosiator* yang *Worldclass Standar* dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu tahun 2024;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
 - d) meningkatkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Worldclass Standar*” dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu tahun 2024;
(*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMpolri,progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1*);
 - e) meningkatkan

- e) meningkatkan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar* dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan Pemilu tahun 2024;
(giat3100,3151,3141/progProfesionalismeSDMPolri,LidikSidik/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- f) meningkatkan pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Reskrim, Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
(giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1)
- h) melaksanakan peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;
(giat3072,3100/progDukma,progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat3068,3091/progDukma/SP4/SS3/IKPb/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mewujudkan

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog2);
 - b) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
(giat5053/progDukma SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog2);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police* 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan pemantapan program proaktif rekrutmen guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2);
 - b) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan Kader unggul yang dapat berkompetitif;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);
 - c) melanjutkan penyiapan Kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);
 - d) melaksanakan rekrutmen Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *normal growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2024 sebanyak Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) sebanyak 32.925 orang dengan rincian: Akpol sebanyak 175 terdiri dari:

Taruna 150 orang dan Taruni 25 orang, SIPSS sebanyak 100 orang, Bintara Polri sebanyak 27.800 terdiri dari: PTU Pria 25.100 orang, PTU Wanita 1.200 orang, Brimob 1.000 orang dan Polaird 500 orang, Tamtama Polri sebanyak 3.500 terdiri dari: Brimob 3.000 orang dan Polairud 500 orang dan ASN 1.350 orang.

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2);

- e) melaksanakan melaksanakan seleksi Dikbang Pegawai Negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2024 sebanyak 18.261 orang terdiri dari: Lemhannas 60 orang, Sespimti 90 orang, Sespimmen 150 orang, S2 KIK-UI 20 orang, S2 Kriminolog UI 10 orang, S2 MSDM 20 orang, S3 STIK-PTIK 10 orang, S2 STIK-PTIK 30 orang, S1 STIK-PTIK 200 orang, Sespimma 200 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 1.500 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 2.000 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 300 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 300 orang, PKN I 15 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Dikbangspers 12.986 orang;

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);

- f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3,giat1,indikator1);

- g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;

(giat3104/ prog ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3,giat1,indikator1);

h) menyiapkan

- h) menyiapkan dan mengelola personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditempatkan di IKN secara bertahap; (*giat3108/ProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKPa/ProgQuickWins, prog3*);
- 4) arah bijak: meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan rintisan dan perpanjangan MoU Kermadik Dagri dan Lugri; (*giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3*);
- b) melanjutkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri; (*giat3100,3120,3122/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/ SP4/ SS3/IKPa/ProgQuickWins,prog3*);
- c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *CAT (Computer Asisted Test)* ditingkat Polda; (*giat3107/ prog ProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKPa /ProgQuickWins,prog3*);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*" serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);

- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (*kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik*) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi guna mendukung “*program manajemen talenta*” serta memperkuat penempatan lulusan Akpol di fungsi Binmas;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);

- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa/Prog QuickWins,prog3);

- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

(giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri, Harkamtib mas/SP4/SS3/IKPa/ProgQuickWins,prog3);

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7);

- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly*;

(giat

(giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7);

- c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan Asabri;

(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7);

- d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);

(giat3072,5062/progDukma/SP4/SS5/IKPe/ProgQuickWins,prog7);

- e. Sasaran Prioritas V “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;
(giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);

- b) pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;

(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);

- c) pemenuhan peralatan, materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;

(giat

- (giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- d) melanjutkan pengembangan Pembangunan Indonesia Safety Driving Center;
- (giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- e) melanjutkan dan meningkatkan pembangunan RTMC/TMC;
- (giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3, 4,5,6,7,8);*
- f) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;
- (giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3, 4,5,6,7,8);*
- g) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
- (giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS 4/ IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- h) melanjutkan Litbang guna pembuatan *purwarupa* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
- (giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- i) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan bencana;
- (giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*

j) melanjutkan

- j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkamtibmas dan Almatsus Polri terkini (Min dan Maks);
(giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - k) pemenuhan peralatan penanganan awal Bencana, Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama;
(giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/Prog QuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - l) pemenuhan Almatsus (R-2 dan R-4) Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah dibidang energi terbarukan;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/Prog QuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - m) pemenuhan Almatsus/Alpalkamtibmas untuk digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024, Perbatasan dan Destinasi Wisata;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/Prog QuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- 2) arah bijak: mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *purwarupa*, berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb / ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - b) mendorong dan mensosialisasikan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;

(giat

*(giat4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb
/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*

- 3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
- a) untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: melanjutkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb
/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- b) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya (Poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung “*Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*”;
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP
b/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- c) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumdin guna *mempercepat* pembangunan di Wilayah Perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan;
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP
b/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*
- 4) arah bijak: melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melanjutkan pembangunan pengembangan laboratorium forensik beserta rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana;
*(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/
ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);*

5) arah

- 5) arah bijak: melanjutkan pengembangan Almatsus SCI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melanjutkan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini;
(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- 6) arah bijak: membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi;
(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- c) mengembangkan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian;
(giat3084,5067/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKPb/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- f. Sasaran Prioritas VI “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis IT”.
- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengoptimalkan

- a) mengoptimalkan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis IT;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog8, giat3,indikator1a,b);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna penguatan efektivitas pengawasan *internal* dan *eksternal* Polri serta netralitas ASN Polri dalam Pemilu 2024;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog8, giat3,indikator1a,b);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis IT;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog8, giat3,indikator1a,b);
- 2) arah bijak: melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan *internal* Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7, giat1, indikator2);
 - b) mendorong pelayanan publik Polri secara *online*;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7, giat1, indikator1,2);
 - c) mengoptimalkan kerja sama antarlembaga dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog7, giat1, indikator2);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;

(giat

(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins, prog7, giat1, indikator2);

- e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhannas dan PKN Tingkat 1;

(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins, prog7,giat1, indikator2);

- f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan operasi Bersih diinternal dan disentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg/ProgQuickWins,prog 7,giat1,indikator2);

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins, prog8,giat1,indikator1,2,3);

- b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog8,giat 1, indikator1,2,3);

4) arah

- 4) arah bijak: meningkatkan tatakelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam; (*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - b) meningkatkan dan mengembangkan sinergisitas dalam *e-Jakstra* guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (*Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri*) guna menyelaraskan pembangunan dilingkungan Polri agar semakin berkualitas; (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan tingkat Satker; (*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - d) melaksanakan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan; (*giat3068,4339,3091/progDukma/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);
 - e) melaksanakan analisis dan Evaluasi Kinerja dan anggaran sesuai SOP dibidang Pembinaan dan Operasional; (*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKPf/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8*);

5) arah

- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan dan melaksanakan monev pemenuhan satu kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah dan mengevaluasi efektivitas kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya DOB termasuk pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat serta Perbatasan;
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
 - c) melanjutkan dan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor;
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan

- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7);

- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro untuk mendorong adanya, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

(giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7,giat 2, indikator1);

- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar program-program Polri berdampak langsung dalam membantu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi, agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7);

- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan

WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7);

- e) meningkatkan pelaksanaan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7).

- f) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro untuk mendorong adanya, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

(giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7,giat 2, indikator1);

- g) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar program-program Polri berdampak langsung dalam membantu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi, agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7);

- h) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7);

i) meningkatkan

- i) meningkatkan pelaksanaan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan satker Polda;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd/ProgQuickWins,prog7*).

2. Arah kebijakan Puskeu Polri.

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
 - 1) Memperkuat pembinaan terhadap pelaporan penggunaan anggaran;
 - 2) Memperkuat pelaksanaan evaluasi penggunaan anggaran.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan verifikasi dokumen keuangan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
 - 1) Meningkatkan kompetensi SDM bidang verifikasi keuangan baik *offline/online*;
 - 2) Memperkuat peran Bidang Keuangan dalam proses verifikasi dokumen keuangan di tingkat wilayah;
 - 3) Memperkuat pembinaan fungsi verifikasi keuangan di Lingkungan Polri.
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi dan evaluasi pembiayaan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
 - 1) Menguatkan struktur, SDM, serta peran dan fungsi Bidang Pembiayaan sebagai pelaksana teknis dalam pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan;
 - 2) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
 - (a) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang berdasar pada SAP;

(b) Mengoptimalkan

- (b) Mengoptimalkan rekonsiliasi data keuangan dengan pihak eksternal dan internal, meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
 - (c) Melaksanakan pemantauan terkait penerapan rekening *Virtual Account* oleh Bendahara Penerimaan Satker.
- d. Peningkatan kualitas SDM Puskeu Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelatihan bagi personel Puskeu Polri;
- e. Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran Puskeu. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
- 1) Memperkuat perencanaan dan penganggaran Puskeu Polri berbasis kinerja;
 - 2) Memperkuat penerapan *Money Follow Program* (MFP).
- f. Penguatan kelembagaan Puskeu Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah memperkuat peran dan fungsi Puskeu Polri sebagai pembina bidang keuangan.

Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Satker Puskeu Polri Tahun 2020-2024 ditetapkan pentahapan kebijakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

“Melanjutkan implementasi serta mengoptimalkan pembinaan, pelayanan publik keuangan Polri yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluasluasnya dengan didukung inovasi sistem keuangan online yang efektif serta profesional”.

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2024.

1. Program dan Kegiatan Puskeu Polri.

a. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) Tujuan

Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional.

2) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana.

1) Tujuan

Modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan

a) Pengembangan peralatan Polri:

- (1) pengadaan perangkat TIK;
- (2) pemeliharaan TIK;
- (3) peralatan sumber Pinjaman Luar Negeri;
- (4) peralatan sumber Pinjaman Dalam Negeri;
- (5) pengadaan peralatan penunjang fungsional.

b) Dukungan manajemen dan tehnik sarpras berupa penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari:

- (1) perawatan kendaraan bermotor roda 4;
- (2) perawatan kendaraan bermotor roda 2;
- (3) perbaikan peralatan kantor.

b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, *preemptif* dan *preventif*.

2) Kegiatan

Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Operasi Kepolisian Berdasarkan Direktif Kapolri.

c. Program Dukungan Manajemen:

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

a) Pelayanan Administrasi Keuangan Polri terdiri dari :

- (1) rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan, Pokja/konsultasi;
- (2) Sosialisasi;
- (3) pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan (PNBP);
- (4) penyusunan program, anggaran dan Renja;
- (5) penyusunan RKA-K/L dan DIPA (PNBP);
- (6) dukungan operasional Satuan Kerja (PNBP);
- (7) penyusunan dan evaluasi LKIP;
- (8) pembinaan fungsi-fungsi;
- (9) Honorarium SAI, SAKPA, SIMAK dan Pengelola Keuangan (PNBP);
- (10) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh (PNBP);

- (11) penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah (PNBP);
 - (12) Anggaran WBK-WBBM;
 - (13) pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang (PNBP);
 - (14) evaluasi/laporan kegiatan (PNBP).
- b) Dukungan pelayanan internal Perkantoran Polri yang terdiri dari :
- (1) pembayaran gaji dan tunjangan;
 - (2) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berupa pengadaan peralatan/perlengkapan kantor;
 - (3) dukungan operasional pertahanan dan keamanan;
 - (a) dukungan operasional Satker;
 - (b) pembinaan fungsi-fungsi;
 - (c) honorarium;
 - (d) kegiatan pembinaan tradisi;
 - (e) giat WBK-WBBM;
 - (4) peningkatan kemampuan.
2. Pagu Indikatif Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024.
- Pagu Indikatif Satker Puskeu Polri T.A. 2024 sebesar Rp26.133.776.642.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Program Profesionalisme SDM Polri sebesar Rp3.740.405.000,-;
 - b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp4.080.028.616.000,- terdiri dari:
 - 1) Pemenuhan Almatsus sebesar Rp4.079.752.373.000,- terdiri dari:
 - (a) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi sebesar Rp25.058.779.000,-;
 - (b) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp1.323.872.423.000,-;
 - (c) Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2.665.750.000.000,-;
 - (d) Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp65.071.171.000,-.
 - 2) Dukungan Manajemen Teknis dan Sarpras Rp276.243.000,- terdiri dari :
 - (a) perawatan kendaraan bermotor roda-4 Rp205.166.000,-;
 - (b) perawatan kendaraan bermotor roda-2 Rp43.560.000,-;
 - (c) perbaikan peralatan kantor Rp27.517.000,-.
 - c. Program

- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berupa dukungan operasional dan operasi kepolisian berdasarkan Direktif Kapolri sebesar Rp635.304.659.000,-;
- d. Program Dukungan Manajemen Rp21.414.702.962.000,- terdiri dari :
- 1) Pelayanan Administrasi Keuangan Polri terdiri dari :
 - (a) rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan, Pokja/konsultasi Rp41.400.000,-;
 - (b) sosialisasi Rp58.350.000,-;
 - (c) pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Rp671.748.000,-;
 - (d) penyusunan program, anggaran dan Renja Rp14.689.000,-;
 - (e) penyusunan RKA-K/L dan DIPA Rp43.885.000,-;
 - (f) dukungan operasional Satuan Kerja Rp1.363.955.000,-;
 - (g) penyusunan dan evaluasi LKIP Rp16.033.000,-;
 - (h) pembinaan fungsi-fungsi Rp441.549.000,-;
 - (i) honorarium SAI, SAKPA, SIMAK dan Pengelola Keuangan Rp401.400.000,-;
 - (j) pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh Rp367.840.000,-;
 - (k) penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Rp4.134.985.000,-;
 - (l) anggaran WBK-WBBM 367.018.000,-;
 - (m) pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang Rp43.244.000,-;
 - (n) Evaluasi laporan/kegiatan Rp1.953.572.000,-;
 - 2) Dukungan pelayanan internal Perkantoran Polri
 - (a) gaji dan tunjangan:
 1. pembayaran gaji Rp1.906.072.047.000,-;
 2. uang lembur Rp481.416.000,-;
 3. remunerasi/tunjangan kinerja Rp19.490.349.112.000,-

(b) operasional

- (b) operasional dan pemeliharaan perkantoran berupa pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Rp196.080.000,-;
- (c) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan:
 - 1. dukungan operasional Satker Rp957.042.000,-;
 - 2. pembinaan fungsi-fungsi Rp316.035.000,-;
 - 3. honorarium Rp3.600.000,-;
 - 4. kegiatan pembinaan tradisi Rp6.000.000.000,-;
 - 5. giat WBK-WBBM 86.485.000,-.
- (d) peningkatan kemampuan Rp321.477.000,-.

KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF T.A. 2024

(Dalam ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen.	Menyelenggarakan fungsi kinerja manajemen Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal serta Pembayaran Gaji dan tunjangan yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi.			
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul.	Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5.	79,0%	Rp464.169
			Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan NPHPW oleh Puskeu Polri.	36 Bidkeu Polda dan Mabes	Rp388.785

Terselenggaranya

(Dalam ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan akuntabel.	Persentase rekomendasi BPK atas LK Satker Polri yang telah Ditindaklanjuti.	100%	Rp4.134.985
			Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bid Bia dengan Laporan Keuangan Polri.	100%	Rp735.034
		Kelembagaan yang Akuntabel dan SDM yang Presisi.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu.	74,50	R273.589
			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu.	93,00	Rp23.697
3100	Program Profesionalisme SDM Polri	Kelembagaan yang Akun tabel dan SDM yang Presisi.	Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara.	94%	Rp3.740.405

- V. Demikian Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri T.A. 2024 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2024.

Jakarta, 31 Juli 2023
 KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

 LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
 BRIGADJEN JENDERAL POLISI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PUSKEU POLRI T.A. 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul.	Persentase jumlah satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5.	79,0%
		Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan NPHPW oleh Puskeu Polri.	36 Bidkeu Polda dan Mabes
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan akuntabel.	Persentase rekomendasi BPK atas LK Satker Polri yang telah ditindaklanjuti.	100%
		Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bid Bia dengan laporan keuangan Polri.	100%
3	Kelembagaan yang Akuntabel dan SDM yang Presisi.	Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara.	94%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu.	74,50
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu.	93,00

Jakarta, 31 Juli 2023
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LOKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADJEN JENDERAL POLISI
PUSAT KEUANGAN

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



**APLIKASI
RENCANA KERJA
PUSAT KEUANGAN POLRI
T.A. 2024**



Jakarta, 31 Juli 2023

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
 3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategi
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.05
 6. Nama Program : Program Profesionalisme SDM Polri
 7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1. Rupiah	2.659.015	3.740.405	2.659.015	3.740.405
a. Pendamping	-	-	-	-
b. Non Pendamping	2.659.015	3.740.405	2.659.015	3.740.405
2. PHLN dan PDN	-	-	-	-
JUMLAH	2.659.015	3.740.405	2.659.015	3.740.405

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya secara profesional dan proporsional.	01 Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(05) Program Profesionalisme SDM Polri									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2023	2024	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3100.EBC	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	011 Pelatihan	260	260	434	OG	0	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(05) Program Profesionalisme SDM Polri

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024			Prakiraan Kebutuhan		Lokasi	
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	Jumlah	2023		2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
3100.EBC	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri		2.659.015	3.740.405	-	-	3.740.405	2.659.015	3.740.405	PUSAT
011	Pelatihan	OU	2.659.015	3.740.405	-	-	3.740.405	2.659.015	3.740.405	
	TOTAL		2.659.015	3.740.405	-	-	3.740.405	2.659.015	3.740.405	

Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

31 Juli 2023
 KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

 LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K. M.H.
 BRIGALIN JENDERAL POLISI

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
 3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategis
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.02
 6. Nama Program : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
 7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1. Rupiah	20,275,951	2,691,085,022	20,275,951	2,691,085,022
a. Pendamping	-	2,665,750,000	-	2,665,750,000
b. Non Pendamping	20,275,951	25,335,022	20,275,951	25,335,022
2. PHLN dan PDN	3,308,260,761	1,388,943,594	3,308,260,761	1,388,943,594
JUMLAH	3,328,536,712	4,080,028,616	3,328,536,712	4,080,028,616

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 mendukung tugas pembinaan dan operasional polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.	01 Prosentase/jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana Polri dalam mendukung pendukung tugas Pembinaan dan Operasional Polri guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(02) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2023	2024	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3084	Pengembangan peralatan Polri	001 Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	87	87	68	UNIT	1	TIDAK	KAPUSKEU
		003 Pemenuhan almatsus (sumber PHLN dan PDN) (PN)	3	3	97	UNIT	1	TIDAK	KAPUSKEU
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	962 Layanan Umum	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
		994 Layanan Perkantoran	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(02) Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP	Jumlah	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
3084.CAF	Pengembangan peralatan Polri		19.999.708	25.058.779	-	-	25.058.779	19.999.708	25.058.779	Pusat
063	Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	OU	7.874.027	24.998.899			24.998.899	7.874.027	24.998.899	
069	Peralatan Kantor	OU	12.125.681	59.880			59.880	12.125.681	59.880	
3084.RAF	Pemenuhan Almitsus (Sumber PHLN dan PDN) (PN)		3.308.260.761	2.665.750.000	1.388.943.594	-	4.054.693.594	3.308.260.761	4.054.693.594	Pusat
075	Peralatan sumber PHLN	OU	1.323.872.423	-	1.323.872.423	-	1.323.872.423	1.323.872.423	1.323.872.423	
076	Peralatan sumber RMP	OU	1.696.170.000	2.665.750.000	-	-	2.665.750.000	1.696.170.000	2.665.750.000	
077	Peralatan sumber PDN	OU	288.218.338	-	65.071.171	-	65.071.171	288.218.338	65.071.171	
5059.EBA	Layanan Perkantoran		276.243	102.783	-	173.460	276.243	276.243	276.243	Pusat
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	OU	102.783	102.783	-	-	102.783	102.783	102.783	
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan	OU	173.460	-	-	173.460	173.460	173.460	173.460	
	TOTAL		3.328.536.712	2.665.852.783	1.388.943.594	173.460	4.080.028.616	3.328.536.712	4.080.028.616	

Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
 3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategis
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.10
 6. Nama Program : Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
 7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1. Rupiah	637,284,931	635,304,659	637,284,931	635,304,659
a. Pendamping	-	-	-	-
b. Non Pendamping	637,284,931	635,304,659	637,284,931	635,304,659
2. PHLN dan PDN	-	-	-	-
JUMLAH	637,284,931	635,304,659	637,284,931	635,304,659

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahasa, ancaman dan gangguan yang menimbulkan cedera	01 Jumlah pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemilihan presiden/wakil, legislatif baik tingkat pusat maupun daerah

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(10) Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2023	2024	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3128.EBA	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Keteriban Masyarakat	Layanan perkantoran Harkamtibmas	12	12	12	LAYANAN	U	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(10) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	Jumlah	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Keteriban Masyarakat		637.284.931	635.304.659	-	-	635.304.659	637.284.931	635.304.659	Pusat 0
			637.284.931	635.304.659	-	-	635.304.659	637.284.931	635.304.659	Pusat
003	Layanan perkantoran Harkamtibmas	OU	637.284.931	635.304.659	-	-	635.304.659	637.284.931	635.304.659	Pusat
	TOTAL		637.284.931	635.304.659	-	-	635.304.659	637.284.931	635.304.659	Pusat

Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

31 Juli 2023

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ADRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
 3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategi
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.01
 6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen
 7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024	Prkiraan Kebutuhan	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1. Rupiah	18,906,149,283	21,414,702,962	18,906,149,283	21,414,702,962
a. Pendamping	-	-	-	-
b. Non Pendamping	18,906,149,283	21,414,702,962	18,906,149,283	21,414,702,962
2. PHLN dan PDN	-	-	-	-
JUMLAH	18,906,149,283	21,414,702,962	18,906,149,283	21,414,702,962

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan internal, dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara mabas polri dan kewilayahan.	01 Prosentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; 02 Prosentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal.

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) Program Dukungan Manajemen									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2023	2024	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3068.EBA	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	962 Layanan Umum	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
3073.EBA	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	994 Layanan Perkantoran	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran	962 Layanan Umum	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(01) Program Dukungan Manajemen

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2023	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP	Jumlah	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri		8.879.155	3.423.679	-	6.495.989	9.919.668	8.879.155	9.919.668	
3068.EBA	Layanan Umum		8.879.155	3.423.679	-	6.495.989	9.919.668	8.879.155	9.919.668	
962	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan	OU	8.879.155	3.423.679	-	6.495.989	9.919.668	8.879.155	9.919.668	PUSAT
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri		18.897.270.128	21.404.783.294	-	-	21.404.783.294	18.897.270.128	21.404.783.294	
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7.684.639	7.363.162	-	-	7.363.162	7.684.639	7.363.162	
962	Layanan Umum	OU	7.684.639	7.363.162	-	-	7.363.162	7.684.639	7.363.162	PUSAT
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		18.889.585.489	21.397.098.655	-	-	21.397.098.655	18.889.585.489	21.397.098.655	
994	Layanan Perkantoran	OU	18.889.585.489	21.397.098.655	-	-	21.397.098.655	18.889.585.489	21.397.098.655	PUSAT
3073.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		-	321.477	-	-	321.477	-	321.477	
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	OU	-	321.477	-	-	321.477	-	321.477	PUSAT
	TOTAL		18.906.149.283	21.408.206.973	-	6.495.989	21.414.702.962	18.906.149.283	21.414.702.962	

Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

31 Juli 2023

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADJEN JENDERAL POLISI
DI KEU